



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERIS YUNianto
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 221202

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.225.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m²/120 m² di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 253 m²/190 m² di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.675.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 356.600.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, NISSAN LIVINA MPV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HADIAH Rp. 9.100.000
5. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 21.500.000
6. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 21.500.000
7. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HADIAH Rp. 19.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 160.500.020

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 187.548.762

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	2.929.648.782
III. HUTANG	Rp.	180.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.749.148.782

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.